

**Politik Pembangunan Gampong**  
**(Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa Pada Masa**  
**Pandemi Covid-19 di Gampong Uteun Bayu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten**  
**Pidie Jaya Aceh**

**Misratul Jannah<sup>1</sup>, M. Akmal<sup>2</sup>, Bobby Rahman<sup>3</sup>, Zulhilmi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh Indonesia  
E-mail Korespondensi : akmal@unimal.ac.id

---

**ABSTRAK**

Kajian ini membahas bagaimana peran institusi politik gampong dalam proses penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi covid-19 di Gampong Uteun Bayu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Aceh. Adapun kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data yang telah diperoleh, bahwa penyaluran dalam bentuk bantuan langsung tunai dana desa jauh lebih efektif dari pada sebelum adanya pandemi. Namun dalam ketepatan penyaluran dana masih dibutuhkan “kepekaan” aparaturnya Gampong dalam melakukan tabulasi, pengamatan serta pendataan penerima BLT dana desa yang lebih transparan. Sebab penyaluran BLT dana desa ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi, dimana aktor politiklah yang memiliki peran paling besar dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:**

*Politik Pembangunan, Pemerintahan Desa, Covid-19*

---

**A. PENDAHULUAN**

Penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) dana desa merupakan suatu bentuk dari politik pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dikarenakan banyak terjadinya kemunduran dibidang ekonomi membuat masyarakat khawatir akan terjadinya krisis ekonomi secara berkepanjangan. Penyaluran BLT dana desa ini diadakan karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang sangat ditakuti oleh masyarakat yang ada di dunia kemunculannya pada akhir

Desember 2019 di negara Cina tepatnya di daerah Wuhan. Pada awal tahun 2020 wabah ini juga mulai merambat kesuluruh dunia, termasuk Indonesia khususnya di daerah Aceh juga.

Uteun Bayu merupakan Gampong yang terletak di kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Aceh. Pada tahun 2020 proses pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami persoalan, karena melemahnya aktivitas ekonomi akibat wabah pandemi covid-19. Namun dalam upaya penanggulangan persoalan tersebut dan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakann salah satunya adalah penyaluran BLT dana desa. Penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) dana desa ini diperuntukan bagi setiap warga yang terdampak.

Namun, dalam proses penyalurannya mengalami kendala. Persoalan utama bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang beranggapan dana BLT harus dibagikan secara merata kepada seluruh warga. Mereka komplain dikarenakan tidak terdata sebagai penerima BLT dana desa. Mereka berpendapat bahwa BLT dana desa seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan informasi dan berita yang mereka terima melalui media. Hal ini membuat aparaturnya gampong agak sulit dalam melakukan pendataan. Persoalan lain, bahwa warga gampong kecewa karena pembagian BLT dana desa sedikit terlambat daripada desa-desa yang lain yang pembagiannya lebih awal. Akumulasi kekecewaan tersebut juga terjadi karena sebelumnya tidak ada transparansi dalam pendataan warga desa yang berhak menerima dana bantuan. Sehingga aparaturnya gampong dinilai tidak adil. Akibatnya, konflik sosial pun terjadi.

Seperti diketahui, proses pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa harus dilakukan hati-hati, dan terbuka atas segala potensi pertambahan penerima manfaat. Penyalurannya juga harus dijamin merata agar tidak menimbulkan

masalah lanjutan. Berdasarkan keterangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDPT) Abdul Halim Iskandar, BLT Dana Desa diperuntukkan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akan tetapi, calon penerima BLT dana desa adalah mereka yang tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan. BLT dana desa berhak diterima oleh keluarga yang dirasa layak, meski mereka belum memiliki KTP elektronik atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akan tetapi, pendataan detail harus dilakukan terhadap penerima BLT dana desa yang belum memiliki NIK tersebut. Namun ada warga desa yang terdampak pandemi tetapi sudah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, maka mereka tidak berhak menerima BLT dana desa (<https://lokaldata.id>).

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini menarik untuk diteliti khususnya terkait bagaimana tata kelola penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada masa pandemi covid-19 agar tepat sasaran dan memiliki dampak bagi warga Gampong Uteun Bayu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Aceh.

## **B. METODE KAJIAN**

Kajian ini yang menjadi objek adalah di desa Uteun Bayu kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mengeluarkan himbauan bersama tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Pidie Jaya. Surat dengan Nomor 88/Kesra/2020 yang ditandatangani Bupati H. Aiyub Abbas, Ketua DPRK A. Kadir Jailani, dan seluruh unsur Forkopimda lainnya. Himbauan ini poin-poin himbauan terkait kesehatan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan politik

pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya aparaturnya desa dalam menstabilkan ekonomi masyarakat dengan cara penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat deduktif (Sugiyono, 2010). Metode kualitatif sengaja digunakan dalam kajian ini karena menelaah fenomena dalam suasana yang berlangsung secara ilmiah. Metode ini digunakan karena peneliti perlu melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dengan demikian, akan mendapatkan data yang banar dan utuh dari perilaku yang diamati dalam bentuk deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Politik Pembangunan Dalam Dimensi Kesejahteraan Rakyat**

Politik pembangunan adalah sebuah terminologi yang merupakan gabungan dari politik dan pembangunan, keduanya adalah konsep yang berbeda tapi memiliki hubungan dan keterkaitan. Politik pembangunan adalah proses politik yang menekankan pada peran institusi politik yang di dalamnya melibatkan banyak aktor untuk kepentingan politik, kesejahteraan, dan pemberdayaan manusia. Politik pembangunan bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan itu yang melibatkan banyak kelompok kepentingan, hal ini kemukakan oleh Warjio (2016) sebagai penulis buku politik pembangunan. Politik pembangunan adalah sebuah paradigma yang memiliki arti dan implementasi tersendiri, lahirnya politik pembangunan sebagai sebuah paradigma diawali dari penilaian yang dilakukan oleh para ahli dan praktisi pembangunan terhadap teori-teori dan praktik pembangunan yang terkait dengan

pemahaman bahwa pembangunan di rumuskan oleh para aktor melalui proses dan kepentingan-kepentingan politik.

Politik pembangunan telah lama dijalankan dan menjadi bagian dalam proses peradaban manusia, khususnya terkait dengan kekuasaan. Pembangunan tidak hanya tentang aspek ekonomi saja tetapi mencakup tentang teknokratis dan birokratis karena pembangunan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan dan politik. Dalam politik pembangunan didalamnya terkandung ide-ide, pemikiran atau gagasan yang baik dari individu atau lembaga yang ingin mendapatkan keuntungan (Warjio, 2016).

### **Pendekatan Kesejahteraan Rakyat**

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari pembentukan sebuah negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Indonesia “.

Jelas dari pembukaan tersebut yang menjelaskan tentang tujuan negara dan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial, yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung. Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2006).

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), melainkan juga sebagai sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan ada juga yang menyebut sebagai anak kandung pergumulan ideologi dari teori sosialisme (Suryono, 2014). Dalam hal ini peran pemerintah dan kebijakan publik sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **2. Corona Virus Disease-19 (Covid-19)**

Latar belakang virus Corona atau (Covid-19), kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019, Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut, Virus Corona atau (covid- 19) diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan, Corona Virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru.

Sebelum (Covid-19) mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan Virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, Virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang sama-sama mirip flu. Virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Infeksi Virus Corona atau Covid-19 disebabkan oleh Corona Virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada sebagian besar kasus corona virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan

berat, seperti Pneumonia, MiddleEast Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Karyono, dkk, 2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa yang melaporkan pertama kali kasus virus corona bukan Pemerintah China, melainkan lembaganya sendiri. Hal itu diketahui setelah WHO memperbarui laporannya tentang tahapan awal munculnya pandemi Covid-19. Seperti dikutip dari AFP, WHO mengaku pertama kali mendapatkan informasi dari kantor perwakilan mereka di China. Ketika itu kasus pertama pneumonia dilaporkan di Wuhan. Kantor WHO di China pada 31 Desember disebut mencatat kasus pneumonia setelah melihat informasi di situs web komisi kesehatan Wuhan. Pada hari yang sama, layanan informasi epidemi WHO juga menerima laporan dari jaringan pengawasan epidemiologi internasional ProMed yang berbasis di Amerika Serikat. Kantor WHO di China pada 31 Desember disebut mencatat kasus pneumonia setelah melihat informasi di situs web komisi kesehatan Wuhan. Setelah itu, WHO meminta pihak berwenang China pada 1 Januari dan 2 Januari untuk menginformasikan tentang kasus-kasus ini. Akan tetapi informasi baru disampaikan pada 3 Januari. Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan pada konferensi pers hari Jumat mengatakan setiap negara memiliki waktu 24-48 jam untuk memverifikasi suatu peristiwa dan melaporkannya.

WHO sendiri dinilai gagal dalam menangani pandemi virus corona oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menganggap WHO bias terhadap China hingga dia akhirnya menyetop bantuan AS untuk organisasi itu pada April lalu. Trump bahkan menyebut WHO sebagai boneka China. Namun semua tuduhan itu dibantah. Sejumlah negara, termasuk AS dan Australia mendesak dilakukan investigasi awal mula pandemi virus corona. Trump juga berulang kali menyebut bahwa virus corona berasal dari laboratorium di Wuhan.

Pada masa pandemi saat ini Indonesia juga mengalami kemunduran baik di bidang ekonomi dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat melemah, dikarenakan bertambahnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membuat peraturan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan PSBB agar masyarakat bisa terhindar dari virus tersebut serta mengurangi angka kematian.

### **3. Gambaran Umum Gampong Uteun Bayu**

Uteun Bayu merupakan salah satu Gampong yang terletak di kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya provinsi Aceh, Indonesia. Gampong yang jumlah penduduknya 1030 jiwa terdiri lebih dari 400 kartu keluarga. Gampong ini memiliki luas wilayah 69,8 Ha yang masyarakatnya terdapat banyak adat istiadat, budaya serta hukum islam yang sangat tinggi. Pada masa dahulu tepatnya pada tahun 1825 sebelum terbentuknya Gampong Uteun Bayu, daerah tersebut masih dipenuhi dengan hutan belantara yang didalam hutan tersebut banyak terdapat pohon bayu dan belum ada satupun permukiman warga sehingga datanglah seorang perantauan dari daerah Beureneun dengan keinginan untuk mencari nafkah dan memperbaiki ekonomi keluarganya, beliau bernama Tgk. Jaa Mantan. Beliaulah yang menamai Gampong tersebut dengan nama Gampong Uteun Bayu, tepatnya pada tahun 1836 Gampong Uteun Bayu terbentuk dan setelah meninggalnya Tgk Jaa Mantan nama almarhum juga diabadikan menjadi salah satu nama dusun yang ada di Gampong tersebut.

Gampong Uteun Bayu memiliki letak daerah yang sangat strategis yaitu : 1. Sebelah Utara dengan Gampong Pulo; 2. Sebelah Selatan dengan Gampong Reudep Meulayu, Gampong Jeulanga Timu dan Gampong Alue Keutapang; 3. Sebelah Timur dengan Meuko Buloh; 4. Sebelah Barat dengan Babah Krueng. Sektor

ekonomi di Gampong Uteun Bayu banyak sekali mulai dari memiliki badan usaha seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan bahkan banyak usaha lainnya.

**Tabel 1 Jumlah penduduk di Gampong Uteun Bayu**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Ulee Kuta	249
2	Harapan Jaya	282
3	Tanjung Mulia	318
4	Tgk Jaa	196
	Jumlah	1030

#### **4. Peran Institusi Politik Gampong Dalam Proses Penyaluran BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Gampong Uteun Bayu**

BLT dana desa merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020, kebijakan ini dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah ekonomi pada saat wabah Covid-19 melanda di seluruh daerah yang ada di Indonesia. BLT yang merupakan suatu bentuk politik pembangunann dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat krisis ekonomi memang sangat membantu memperbaiki ekonomi masyarakat walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Peran institusi politik dalam setiap Gampong memang memiliki peran yang sangat besar dan cukup penting untuk mewujudkan sebuah kebijakan tersebut. Dalam hal ini institusi politik Gampong adalah tokoh utama yang berperan dalam setiap kegiatan yang ada dalam Gampong. Berikut kutipan wawancara:

*“peran institusi politik Gampong dalam proses penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Gampong Uteun Bayu memang penting dan perannya sangat dibutuhkan karena isntitusi politik Gampong adalah bentuk pemerintahan desa yang saat ini merupakan penyambung lidah dari masyarkat pusat. Dalam proses pendataan BLT dana desa aparatur Gampong sudah berusaha semaksimal mungkin mulai dari mendata langsung masyarkat yang berhak menerima BLT dana desa, dokumen hasil dari*

*pendataan dibahas dalam musyawarah Gampong khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan kk calon penerima BLT yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh keuchik bersama perwakilan Tuha Peut Gampong. Institusi politik Gampong adalah tokoh yang sangat berpengaruh atas setiap kebijakan dan penetapan keputusan.” (Mansur, Keuchik Gampong Uteun Bayu, 7 Agustus 2021).*

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa institusi politik Gampong merupakan tokoh utama dalam pelaksanaan segala kebijakan, pada tahun 2020 BLT dana desa pertama kali diterapkan dimana institusi politik Gampong memiliki tugas dan wewenang untuk mendata serta menetapkan siapa saja yang berhak menerima penyaluran BLT tersebut dikarenakan banyak kriteria serta syarat-syarat untuk menerimanya. Institusi politik Gampong yang terdiri dari Keuchik, Sekretaris serta aparatur Gampong lainnya harus siap siaga dalam melakukan pendataan agar tidak ada satupun masyarakat yang tidak terdata walaupun faktanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam kesempatan selanjutnya juga dijelaskan oleh Marzuki Syafari beliau adalah Sekretaris Gampong Uteun Bayu yang mengatakan bahwa;

*“BLT dana desa merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat agar stabilnya ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Bantuan langsung tunai ini ditujukan langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19, aparatur Gampong bersama dengan tuha peut dan tokoh masyarakat lainnya memutuskan dalam hal siapa saja yang berhak menerima BLT tersebut. Dalam pendataan BLT dana desa juga terjadi hambatan dikarenakan masyarakat yang berpendapat bahwa aparatur Gampong tidak adil dalam mendata penerima BLT karena menurut masyarakat masih ada yang layak menerima bantuan namun tidak terdata untuk menjadi penerima.” (Marzuki Syafari. Sekertaris Gampong Uteun Bayu, 7 Agustus 2021)*

Penyaluran BLT dana desa memang memiliki hambatan dikarenakan ekspektasi masyarakat tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan,

tercecernya satu atau dua keluarga itu mungkin terjadi karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang mengatakan dirinya miskin agar bisa mendapatkan bantuan. Keuchik dan sekretaris Gampong sudah melakukan pendataan dengan sangat teliti namun masih saja ada yang tidak terdata.

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Miswardi, SP.d beliau merupakan bendahara Gampong Uteun Bayu;

*“institusi politik Gampong merupakan penyambung lidah paling utama dari pemerintah pusat ke pemerintah Gampong, setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh aparatur Gampong sangat berpengaruh dalam kemajuan politik pembangunan yang ada di suatu Gampong. BLT dana desa merupakan salah satu bentuk dari politik pembangunan, dimana masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk mewujudkan hal tersebut, dalam hal ini institusi politik Gampong terkesan lamban dan ragu-ragu menyangkut BLT dana desa karena dianggap tidak terlalu penting, padahal pada masa pandemi seperti ini BLT dana desa merupakan hal utama yang harus ada untuk menstabilkan ekonomi masyarakat” (Marzuki Syafari. Sekertaris Gampong Uteun Bayu, 7 Agustus 2021)*

Dalam penjelasan diatas oleh Miswardi, SP.d selaku bendahara Gampong Uteun Bayu mengatakan bahwa BLT dana desa diGampong Uteun Bayu sudah disalurkan sesuai dengan wewenang dan arahan dari pemerintah pusat mulai dari mendata penerima BLT dana desa sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **5. Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan BLT Dana Desa Namun Tidak Mendapatkannya.**

Masyarakat merupakan faktor utama dari pelaksanaan kebijakan yang ada di sebuah Gampong. Aspek penting dalam terlaksananya kebijakan adalah adanya masyarakat, kebijakan penyaluran BLT dana desa ditujukan terhadap masyarakat miskin yang ada di sebuah gampong. Tentunya syarat dan ketentuan untuk mendapatkan BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19 pasti ada. Dalam hal ini

diperlukan yang namanya ketelitian aparaturnya Gampong dalam melakukan pendataan agar tidak ada serta tidak ada yang namanya kecenderungan sosial antara aparaturnya Gampong dengan masyarakat.

Gampong Uteun Bayu yang terdiri dari empat dusun yaitu dusun Ulee Kuta, Harapan Jaya, Tanjong Mulia, dan dusun Tgk Jaa, penerima BLT dana desa berjumlah 89 kartu keluarga dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel 2 Penerima BLT Dana Desa**

No	Nama Dusun	BLT-DD
1	Ulee Kuta	18
2	Harapan Jaya	25
3	Tanjong Mulia	28
4	Tgk Jaa	18
Jumlah		89

Dari tabel di atas dapat dilihat penerima BLT dana desa berjumlah 89 orang dari 400 kepala keluarga, namun masih ada juga dua orang yang berhak mendapatkan BLT dana desa tapi tidak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan kurang telitnya aparaturnya desa dalam melakukan pendataan tercecernya data yang dikumpulkan membuat masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak mendapatkannya.

### **Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan BLT Dana Desa**

Tujuan utama dari adanya penyaluran BLT dana desa adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, pada masa pandemi seperti sekarang ini ekonomi masyarakat sangat terpuruk dikarenakan banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan mata pencaharian karena di pecat. Dalam proses penyaluran BLT dana desa di Gampong Uteun Bayu memiliki sedikit hambatan yaitu tidak meratanya pembagian bantuan tersebut. BLT dana desa yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19

agar stabilnya ekonomi masyarakat. Dalam hal ini juga diketahui dalam keterangan Mansur selaku keuchik di Gampong Uteun Bayu, bahwa;

*“kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari sebuah pemerintahan dimana masyarakat adalah tokoh utama yang sangat penting untuk disejahterakan baik itu dari segi ekonomi maupun segi lainnya, kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya penyaluran BLT dana desa memang lumayan terbantu walau tidak mencukupi mengingat nominal yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat tersebut namun setidaknya bias meringankan beban masyarakat”* (Mansur, Keuchik Gampong Uteun Bayu, 2021).

Pembagian BLT dana desa setidaknya bisa membantu ekonomi masyarakat dalam hal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun tidak semua masyarakat berhak menerima bantuan ini dikarenakan ada kriteria tersendiri. Pada kesempatan yang sama juga diterangkan oleh Sekretaris Gampong Uteun Bayu, bahwa;

*“menurut saya kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya penyaluran BLT dana desa memang agak sedikit terbantu walaupun tidak sepenuhnya, karena nominal yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehari-harinya apalagi dimasa pandemi seperti saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Namun dengan adanya bantuan ini masyarakat merasa sedikit lega”*. (Marzuki, Sekretaris Gampong Uteun Bayu, 2022).

Berbeda dengan kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya pandemi, ekonomi masyarakat di Gampong Uteun Bayu dinilai cukup stabil dikarenakan semua masyarakat masih bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan masing-masing sehingga dana desa hanya terkhusus untuk pembangunan yang ada di Gampong saja tidak perlu dibagi untuk masyarakat sebagai bantuan langsung tunai. Pada kesempatan ini juga diterangkan oleh aparatur desa Uteun Bayu dalam wawancara yang mengatakan;

*“Seperti kita lihat sekarang ekonomi masyarakat sangat terpuruk setelah adanya wabah Covid-19 dimana banyak sekali masyarakat yang kehilangan*

*lapangan pekerjaan, adanya BLT dana desa ini setidaknya meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan. Bantuan ini diberikan kepada seluruh warga miskin yang dibagi berdasarkan atas perhitungan penerima di kali nominal masing-masing penerima dengan persentase hampir 80 persen” (Miswardi, 2021).*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing penerima BLT memiliki porsi yang sama tidak ada perbedaan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan yang namanya kesatuan antara aparaturnya desa agar tidak ada satupun masyarakat yang ada di Gampong Uteun Bayu tidak mendapatkan BLT dana desa yaitu dengan cara pendataan yang valid dan tidak ada yang tercecer satupun. Sedangkan bagi salah seorang penerima BLT dana desa yang ada di Gampong Uteun Bayu yaitu ibu Ratna Sari, juga mengatakan dalam wawancara;

*“menurut saya bantuan langsung tunai yang ada di Gampong Uteun Bayu merupakan bentuk yang sangat efisien dan sebuah kebijakan yang sangat bagus. Karena efek pandemi yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya. Pandemi yang membuat masyarakat sangat kesulitan dalam mencari uang dan kesulitan dibidang sosial karena dibatasinya jarak antar masyarakat untuk tidak saling membuat perkumpulan atau kerumunan agar terhindar dari wabah COVID-19. Di Gampong uteun bayu saya rasa ada sedikit kekecewaan karena masih adanya masyarakat yang layak menerima BLT namun tidak mendapatkannya” (Ratna Sari, 2021).*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat yang mendapatkan BLT dana desa memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat yang terdapat pandemi Covid-19. Pada kesempatan yang sama juga diterangkan oleh warga yakni Syamaun dalam wawancara;

*“pendapat saya tentang adanya BLT dana desa memang sangat bagus karena bisa membantu ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terdampak pandemi, masyarakat yang mengalami kegagalan dibidang ekonomi ikut terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai ini. Walaupun jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat*

*setidaknya bisa sedikit memabantu, namun sangat disayangkan ada dua orang yang berhak mendapatkan BLT dana desa ini namun dia tidak mendapatkannya saya tidak tahu penyebab sehingga kejadian seperti ini entah itu memang ada satu atau orang yang tercecer ataupun memang ada unsur kesengajaan dari aparaturnya Gampong pada saat melakukan pendataan.”(Syamaun, 2021).*

Dapat diketahui bahwa disini masyarakat Gampong Uteun Bayu menilai aparaturnya Gampong yang masih kurang teliti dalam melakukan pendataan penerima BLT dana desa sehingga masih ada masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan ini tapi malah tidak menerimanya dikarenakan kelalaian dalam melakukan pendataan, seharusnya pendataan ini dilakukan secara teliti oleh aparaturnya Gampong dikarenakan nasib masyarakat dibidang ekonomi sangat bergantung dengan adanya bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah. Senada dengan Boihaqi selaku masyarakat yang ada di Gampong Uteun Bayu, yang mengatakan dalam wawancara;

*“menurut saya adanya BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19 merupakan kebijakan yang sangat bagus karena ada banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi pada masa sekarang, namun ketelitian aparaturnya Gampong dalam melakukan pendataan sangat diperlukan sehingga tidak terjadinya salah data ataupun salah dalam menetapkan masyarakat yang berhak mendapatkan BLT dana desa pada masa pandemi COVID-19 walaupun masih adanya satu dua keluarga yang tercecer dalam pendataan tersebut.”(Boihaqi, 2021)*

Penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19 dibutuhkan ketelitian aparaturnya gampong agar tidak ada yang tercecer satupun keluarga dalam proses penyaluran BLT tersebut. Pada kesempatan berikutnya, juga diketahui dalam wawancara terhadap dua orang masyarakat penerima BLT yaitu Ibu Rahmidar dan juga Iu Nuraina, berikut kutipannya;

*“ menurut kami penyaluran BLT dana desa seperti sekarang ini merupakan suatu kebijakan yang sangat efisien yang dilakukan oleh pemerintah, karena*

*denga adanya BLT dana desa ini bisa membantu masyarakat miskin yang ada di Gampong Uteun Bayu dalam bidang ekonomi, karena banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Namun peran aparatur Gampong dalam melakukan pendataan lebih penting tanpa adanya kecendrungan sosial antara aparatur gampong dengan masyarakat."*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa mengenai pendataan penerima BLT dana desa yang ada di gampong Uteun Bau memang kurang teliti karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan BLT dana desa pada tahun 2020.

### **Pembahasan :**

#### **1. Masyarakat Yang Berhak Tapi Tidak Dapat Dan Masyarakat Yang Mendapat Tapi Tidak Berhak**

Penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi COVID-19 memang lebih diperlukan daripada sebelum adanya pandemi banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat wabah ini. Penyaluran BLT dana desa dibutuhkan yang namanya syarat serta ketentuan yang berlaku, peran aparatur gampong dalam melakukan pendataan sangatlah penting. Gampong Uteun Bayu memiliki empat dusun tentunya tidak mudah dalam melakukan pendataan karena banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Gampong tersebut. Proses pendataan yang dilakukan oleh aparatur Gampong di Uteun Bayu memang sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih saja ada satu atau dua keluarga yang tercecer karena terburu-burunya proses pendataan. Di dusun Tanjong Mulia ada dua orang masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BLT dana desa padahal dia berhak mendapatkannya. Dari 28 keluarga yang mendapatkan BLT dana desa masih ada dua orang yang tidak mendapatkannya. Hasil penelusuran lebih dalam, masih ada juga masyarakat yang sudah mendapatkan BLT dana desa padahal dia tidak berhak mendapatkannya.

## **2. Peran Institusi Politik Gampong Dalam Proses Penyaluran BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Gampong Uteun Bayu**

Institusi politik merupakan lembaga utama yang ada di Gampong untuk menyampaikan serta melaksanakan semua kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, program bantuan langsung tunai ini sangat membantu ekonomi masyarakat yang mengalami kemunduran dikarenakan efek pandemi Covid-19. Peran institusi politik memang memiliki peran yang cukup besar dalam proses penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang muncul pada akhir tahun 2019 dan merambat ke seluruh dunia pada tahun 2020 termasuk Negara Indonesia. Adanya virus ini membuat masyarakat khawatir dan sangat waspada agar tidak terkena virus tersebut. Pada masa pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan yang namanya peran pemerintah untuk menstabilkan segala aspek kehidupan termasuk aspek politik, pembangunan serta aspek ekonomi.

Penyaluran dana desa dalam bentuk bantuan langsung tunai dana desa atau Gampong jauh lebih efektif dari pada sebelum adanya pandemi. Di Gampong Uteun Bayu juga ada yang namanya penyaluran BLT dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk dari politik pembangunan yang ada dalam sebuah Gampong. Karena banyak terjadinya kemunduran di bidang ekonomi membuat masyarakat waspada akan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam hal ini dibutuhkan yang namanya kepekaan aparatur Gampong dalam melakukan pengamatan serta pendataan penerima BLT dana desa. Penyaluran BLT dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi, dimana aktor politiklah yang memiliki peran paling besar dalam pelaksanaan politik pembangunan yang ada di sebuah Gampong.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah teori politik pembangunan yang secara terminologi merupakan gabungan dari politik dan pembangunan, yang keduanya adalah konsep yang berbeda namun memiliki makna dan kaitan antara satu dan lainnya. Politik pembangunan adalah proses yang menekankan pada peran institusi politik yang ada di Gampong dan didalamnya melibatkan banyak aktor untuk kepentingan politik, kesejahteraan dan pemberdayaan manusia.

Penggunaan dana desa pada tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang digunakan untuk mendamai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Arah penggunaan dana desa tertuju pada kebutuhan tertentu yang menjadi desakan pada masyarakat yang ada di Gampong, yaitu dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Adanya pandemi membuat masyarakat merasa sangat terpuruk, karena sebagian masyarakat yang bekerja di sektor swasta kehilangan pekerjaan serta banyak ekonomi di pasar-pasar Gampong mengalami pelanggan dan tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu timbullah kebijakan penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Dalam hal pendataan ini dilakukan oleh aparatur Gampong bersama tuha peut dan tokoh masyarakat lainnya untuk memutuskan siapa saja yang berhak menerima BLT dana desa. Mekanisme pendataan yang dilakukan secara musyawarah Gampong khusus agenda validasi, finalisasi dan penetapan data kepala keluarga penerima BLT dana desa dan penegasan dokumen yang berpedoman pada surat Dirjen PPMD Kemendes PDPTT Nomor:9/PRI.00/IV/2020

yaitu tepatnya pada tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT dana desa (Surat Dirjen PPMD Kemendes PDTT Nomor:9/PRI.00/IV/2020

Tidak hanya untuk memimpin Gampong peran institusi politik Gampong juga sangat diperlukan terhadap perkembangan politik pembangunan yang ada di sebuah Gampong. Dana desa pada masa pandemi digunakan untuk hal-hal yang mendesak di Gampong sesuai dengan prinsip dasar penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dengan kata lain dana desa pada masa pandemi di prioritaskan untuk menangani hal-hal yang mendesak bagi Gampong yaitu untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 serta menangani dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Lalu dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terutama untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020).

### **3. Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Blt Dana Desa Tapi Belum Mendapatkannya**

Masyarakat merupakan salah satu unsur dari Gampong, dimana masyarakat memiliki peran serta hak dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh institusi politik yang ada di Gampong. Kebijakan penyaluran BLT dana desa merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk semua daerah yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menstabilkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat yang ada dalam sebuah Gampong.

Di Gampong Uteun Bayu juga ada yang namanya penyaluran BLT dana desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Gampong tersebut, syarat penerima dalam penentuan BLT dana desa berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Mansur selaku Keuchik di Gampong Uteun Bayu yaitu metode

perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT dana desa terdiri dari khusus Gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atas nama Bupati Pidie Jaya, penyaluran BLT dana desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima BLT dana desa, penyaluran secara non tunai dilakukan dengan membuka rekening tabungan Bank Pemerintah, penyaluran tunai harus memperhatikan prinsip transparansi akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 menjaga jarak menghindari kerumunan dan memakai masker, Keuchik sendiri yang menyampaikan daftar tanda terima penyaluran BLT dana desa yang telah ditandatangani kepada Bupati melalui Camat.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses seluas-luasnya mengenai keuangan suatu daerah. Di Gampong Uteun Bayu dapat dilihat transparansi memang sudah ada namun masih kurangnya peran aparatur Gampong dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat sehingga tidak terciptanya politik pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Maka dari itu pentingnya aparatur Gampong yang teliti serta jeli dalam melakukan segala hal termasuk dalam melakukan pendataan BLT dana desa tersebut dikarenakan masih ada masyarakat miskin di Gampong Uteun Bayu yang lebih berhak mendapatkan bantuan ini. Kelalaian seperti inilah yang membuat masyarakat kecewa terhadap institusi politik yang ada di gampong Uteun Bayu.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan mengenai politik pembangunan dalam penyaluran BLT dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Gampong Uteun

Bayu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa; berdasarkan data yang telah diperoleh, penyaluran dana desa dalam bentuk bantuan langsung tunai dana desa atau Gampong jauh lebih efektif dari pada sebelum adanya pandemi. Di Gampong Uteun Bayu juga ada yang namanya penyaluran BLT dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk dari politik pembangunan yang ada dalam sebuah Gampong. Karena banyak terjadinya kemunduran di bidang ekonomi membuat masyarakat waspada akan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam hal ini dibutuhkan yang namanya kepekaan aparatur Gampong dalam melakukan pengamatan serta pendataan penerima BLT dana desa. Penyaluran BLT dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi, dimana aktor politiklah yang memiliki peran paling besar dalam pelaksanaan politik pembangunan yang ada di sebuah Gampong. Tidak hanya untuk memimpin Gampong peran institusi politik Gampong juga sangat diperlukan terhadap perkembangan politik pembangunan yang ada di sebuah Gampong. Dana desa pada masa pandemi digunakan untuk hal-hal yang mendesak di Gampong sesuai dengan prinsip dasar penetapan prioritas penggunaan dana desa. Selain itu, bahwa Gampong Uteun Bayu yang terdiri dari empat dusun yaitu dusun Ulee Kuta, Harapan Jaya, Tanjong Mulia, dan dusun Tgk Jaa, penerima BLT dana desa berjumlah 89 kartu keluarga, Maka dari itu pentingnya aparatur Gampong yang teliti serta jeli dalam melakukan segala hal termasuk dalam melakukan pendataan BLT dana desa tersebut dikarenakan masih ada masyarakat miskin di Gampong Uteun Bayu yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kelalaian seperti inilah yang membuat masyarakat kecewa terhadap institusi politik yang ada di Gampong Uteun Bayu.

**Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Praktik*. Jakarta: Rienaka.
- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harisson, Lisa. (2009). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karyono, Rohadin. Devia Indriyani. *Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID-19) Kabupaten Indramayu*, Jurnal: Kolaborasi Resolusi Konflik ISSN 2655-8823.
- Muhyiddin. (2020). *COVID-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Journal of Development Planning.
- Mufida, Anisa. (2020). *Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep*. Buletin Hukum dan Keadilan.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan : Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Cetakan I. PT Fajar Interpratama Mandiri: Penerbit Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Bagong. Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryabrata, Sumadi. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- S. P . Varma. (1987). *Teori Politik Modern*. Jakarta : Rajawali Pres

Lokadata.id. (2020). *Potensi Masalah Dari Penyaluran BLT Dana Desa*.  
<https://lokadata.id/artikel/potensi-masalah-dari-BLT-dana-desa> (Diakses 26 Januari 2021).

Cnnindonesia.com, 2020.*WHO Ungkap Laporan Pertama Virus Corona Bukan Dari China*,  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200704184924134-520861/who-ungkap-laporan-pertama-virus-corona-bukan-dari-china> (diakses 10 Februari 2021).

Merdeka.com, 2020.*Riset UI Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Selama Pandemi Lebih Efektif*,  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/riset-ui-sebut-penyialuranBLT-dana-desa-selama-pandemi-lebih-efektif.html> (Diakses 26 Januari 2021)